

Pendidikan Hak-Hak Manusia Dalam Masyarakat Indonesia Modern

**Apakah proses demokratisasi memiliki pengaruh pada sikap masyarakat
terhadap pembunuhan 1965-1966?**



David Longo

West Java Field Studies (WJFS)

Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Juni 2015**

Pendidikan Hak-Hak Manusia Dalam Masyarakat Indonesia Modern

**Apakah proses demokratisasi memiliki pengaruh pada sikap masyarakat
terhadap pembunuhan 1965-1966?**



David Longo

West Java Field Studies (WJFS)

Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Juni 2015**

Halaman Pengesahan

**Studi Kasus: Pendidikan Hak-Hak Manusia Dalam Masyarakat Indonesia
Modern**

**Apakah proses demokratisasi memiliki pengaruh pada sikap masyarakat
terhadap pembunuhan 1965-1966?**

**Oleh
David Longo
NIM: 2014331239**

***David Longo* Penulis**

Tanggal, 3 Juni 2015

***Dr. Mangadar Situmorang Ph.D.*
Dean FISIP (UNPAR)**

***Dr. I Nyoman Sudira Ph.D.*
Pembimbing**

***Elena Williams*
ACICIS Resident Director**

Abstract

The issue of human rights is controversial, especially with regard to Indonesian society in the post-New Order era. This is because the universal nature of human rights often clashes with local audiences, particularly in young post-authoritarian countries striving to become successful democracies. It has been 17 years since the fall of Suharto and in this sense; Indonesia is still a relatively young democracy. There has been much emphasis on fulfilling widely accepted democratic practices, especially with regard to Indonesia's controversial human rights history.

There has been much progress towards freedom of information and discussion towards Indonesia's human rights history, but many events remain taboo and understanding limited. Namely the mass killings directed at Communist Party members in 1965-66 that resulted in the deaths of hundreds of thousands of innocent people. There is now much greater awareness about the event and many grassroots movements that are striving towards a reconciliation process. However on an official level the Indonesian government has refused to acknowledge that human rights abuse occurred and there are no government initiatives currently striving towards truth and reconciliation.

The first substantive chapter, chapter two, discusses the sentiments of government officials and groups, and also in the national school curriculum. The curriculum has remained largely unchanged since the New Order period and remains both

rigid and nationalistic, with focus on rote learning. The third chapter discusses how the mass killings do not feature in the curriculum and the idea of critical thinking is not encouraged. This is not only creates a false impression of historical events but also discourages critical analysis and a sense of human rights. The aim of this paper is not to argue necessarily against what history is being taught, but merely how history is being taught. The students need to be provided with multiple perspectives and an analytical approach so that they can achieve a balanced interpretation of the relevant topic.

To simply accept certain ideas as fact without adequate scrutiny can have dangerous consequences. This is especially true of Indonesia that is inhabited by many diverse cultures and has a history of conflict. Aside from the fact that the killings are largely absent from the curriculum, the current official narrative is that the mass killings were justified in defense of the Indonesian nation. The communists were allegedly responsible for the 1965 coup and against the national idea of Pancasila. However the communist party had minimal involvement, if any, in the coup and party ideas did not necessarily clash with Pancasila. They were in fact attacked for political reasons due to their growing political strength that arguably threatened the position of the military and Islamic groups. I conclude that the killings remain both taboo and misunderstood largely due to the continuation of the New Order curriculum. This has created a human rights challenge for Indonesia as the idea of communism continues to cause conflict and

suffering within Indonesian society, namely due to a lack of government support towards human rights education.

Abstrak

Isu hak asasi manusia adalah kontroversial, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia di era pasca-Orde Baru. Hal ini karena sifat universal hak asasi manusia, yang sering bentrok dengan penduduk lokal, terutama dalam negara-negara pasca-otoriter, yang mana berjuang untuk menjadi negara demokrasi yang sukses. Sudah 17 tahun sejak jatuhnya Suharto dan dalam pengertian ini; Indonesia masih merupakan negara demokrasi yang relatif muda. Ada banyak penekanan pada pemenuhan praktek demokrasi diterima secara luas, khususnya yang berkaitan dengan sejarah hak asasi manusia kontroversial di Indonesia.

Sudah ada banyak kemajuan dalam kebebasan informasi dan diskusi terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia, tetapi banyak peristiwa yang masih tabu dan keterbatasan dalam pemahaman. Misalnya, pembunuhan massal diarahkan pada anggota Partai Komunis di 1965-1966 yang mengakibatkan kematian ratusan ribu orang tak bersalah. Saat ini sudah ada kesadaran yang lebih besar tentang acara dan banyak pergerakan melalui akar sumber yang berjuang menuju proses rekonsiliasi. Namun pada tingkat pemerintah Indonesia, pejabat masih terus menolak untuk mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi dan tidak ada inisiatif-inisiatif pemerintah yang berjuang menuju kebenaran dan rekonsiliasi.

Bab pertama, bab 2, berdiskusi tentang sentimen dari pejabat pemerintah dan kelompok-kelompok, tetapi juga dalam kurikulum sekolah nasional. Kurikulum, telah sebagian besar tetap tidak berubah sejak masa Orde Baru dan tetap baik, kaku dan nasionalistik, dengan fokus pada hafalan. Bab 3 berdiskusi bagaimana pembunuhan massal masih tidak fitur dalam kurikulum dan gagasan pemikiran kritis tidak dianjurkan. Ini bukan hanya menciptakan kesan palsu dari peristiwa sejarah, tetapi juga keengganan menuju analisis kritis dan rasa hak asasi manusia. Tujuan dari makalah ini adalah tidak berdebat menentang apa sejarah yang diajarkan, tetapi hanya bagaimana sejarah yang diajarkan. Para siswa perlu diberikan dengan berbagai perspektif dan pendekatan analitis sehingga mereka dapat mencapai interpretasi seimbang topik yang relevan.

Untuk hanya menerima ide-ide tertentu sebagai fakta tanpa pengawasan yang memadai dapat memiliki konsekuensi berbahaya. Hal ini terutama berlaku dari Indonesia yang dihuni oleh banyak budaya yang beragam dan memiliki sejarah konflik. Selain dari fakta bahwa pembunuhan sebagian besar absen dari kurikulum, narasi resmi saat ini adalah bahwa pembunuhan massal dibenarkan dalam membela bangsa Indonesia. Komunis diduga bertanggung jawab atas kudeta 1965, dan menentang gagasan nasional Pancasila. Namun partai komunis memiliki keterlibatan minimal, jika ada, dalam kudeta dan pihak ide tidak selalu berbenturan dengan Pancasila. Mereka sebenarnya diserang karena alasan politik karena kekuatan mereka tumbuh politik yang bisa dibilang mengancam posisi militer dan kelompok-kelompok Islam. Saya menyimpulkan bahwa pembunuhan

ini tetap baik tabu dan disalahpahami sebagian besar disebabkan oleh kelanjutan dari kurikulum Orde Baru. Hal ini telah menciptakan tantangan hak asasi manusia bagi Indonesia sebagai ide komunisme terus menyebabkan konflik dan penderitaan dalam masyarakat Indonesia, yaitu karena kurangnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan hak asasi manusia.

Kata Pengantar

Saya ingin berterima kasih semua orang yang membantu saya dengan menulis dan meneliti tulisan ini, terutama karena topik ini cukup kontroversial dan tidak selalu mudah untuk berbicara tentang. Ada banyak orang lokal dan mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan yang ingin tetap anonim dan saya akan menghormati keinginan mereka. Namun ada berbagai orang yang saya ingin berterima kasih dalam nama, tidak hanya untuk kontribusi akademik mereka, tetapi juga membantu untuk mengoreksi tulisan ini. Saya hanya mulai belajar bahasa Indonesia tahun lalu, jadi bantuan mereka lebih dihargai. Pertama, saya ingin berterima kasih Nyoman Sudira, siapa yang telah membimbing saya dan membantu saya selama proses berlangsung. Dia telah memberikan banyak dorongan dan ide-ide, yang telah sangat membantu.

Saya ingin berterima kasih Dede Oetomo dari Universitas Surabaya, Adrien Vickers dari Universitas Sydney, Greg Fealy dari Universitas Nasional Australia, Baskara Wardaya dari Universitas Sanata Dharma dan Vanessa Hearman dari Universitas Sydney. Mereka semua memberi pendapat yang sangat bernilai dan juga banyak sumber penelitian yang bermanfaat. Saya ingin berterima kasih Mohammad Imam Aziz dari kelompok Syarikat, dan juga anggota Nahdlatul Ulama. Dia sangat murah hati dengan waktu dan masukan ke dalam masalah hak asasi manusia, menekankan perlunya tindakan pemerintah lebih.

Saya ingin berterima kasih teman saya dan teman sekelas dari kursus Konflik Resolusi, Restu Negraha. Dia sudah mendorong penelitian saya, dan membantu saya bertemu orang-orang lain yang ingin berbicara tentang topik saya. Ini sudah memberi saya perspektif baik tentang sentimen-sentimen orang lokal menuju topik saya. Meskipun kami tidak selalu setuju, kami kedua menyadari kepentingan dari debat sehat tentang hak-hak manusia dalam masyarakat Indonesia.

Saya mau berterima kasih orang dari ACICIS, terutama Elena Williams, Dyah Pandam Mitayani dan Gabriella Alinda Mamonto. Saya mau berterima orang staf dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Mereka semua membantu saya dengan mendukung dan diperbolehkan saya memiliki pengalaman yang menarik dan kultural.

Daftar Isi

1 Pendahuluan.....	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Tujuan dari Penelitian.....	14
1.3 Pembenaran untuk Studi Tersebut.....	15
1.4 Metodologi.....	17
2 Sikap Utama dalam Masyarakat Indonesia Menuju Isu dari Pembunuhan pada 1965-66.....	21
2.1 Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada zaman sekarang.....	21
2.2 "Kudeta" adalah asal Rezim Orde Baru.....	23
2.3 Anti-komunisme dan Konflik di Indonesia.....	25
2.4 Rekonsiliasi Gerakan pada Dua Tingkat.....	29
2.5 Kesalahpahaman tentang Komunisme.....	32
2.6 Kelanjutan dari Narasi Orde Baru di masyarakat Indonesia.....	36
3 Misa Pembunuhan di Kurikulum di Indonesia.....	38
3.1 Kurangnya pengakuan dalam Sistem Pendidikan.....	38
3.2 Memahami Ide Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	43
3.3 Sentimen Anti-Komunis dalam Masyarakat.....	46
3.4 Sejarah Buku teks di Modern Indonesia.....	50
4 Kesimpulan.....	57
4.1 Masih ada Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi untuk Isu Pembunuhan pada 1965-66.....	57
4.2 Saran.....	60

4.3 Masalah dalam Penelitian.....	62
5 Daftar Pustaka.....	64
5.1 Artikel Akademik.....	64
5.2 Buku-Buku.....	64
5.3 Wawancara.....	65
5.4 Artikel Koram.....	65
5.5 Media Elektronik.....	66

1 Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang.

Pembunuhan dari 1965-1966 adalah peristiwa yang menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia dan rekonsiliasi terhadap acara ini merupakan elemen penting dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang luar rezim Orde Baru. Hal ini penting karena Indonesia berusaha untuk membangun dirinya di panggung dunia dan membedakan dirinya dari warisan Orde Baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun apa yang memainkan peran pendidikan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah dan dampak ini bagi masyarakat Indonesia karena berusaha untuk menjadi negara demokrasi. Pembunuhan ini merupakan suatu bukti penting karena itu sudah membantu mendirikan rezim Orde Baru dan juga menjadi sumber legitimasi nya. Hal ini dapat dilihat melalui video propaganda yang ditampilkan selama Orde Baru disebut "Pengkhianatan G 30 / PKI," dan dibuat wajib untuk semua siswa selama Orde Baru.¹

Rincian 30 September 1965 tetap diperebutkan, tetapi jelas bahwa itu dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru dengan konsekuensi abadi. Partai Komunis (PKI) disalahkan untuk acara sehingga memberikan legitimasi untuk pemberantasan musuh politik utama dari militer melalui pembunuhan massal.

Suharto yang dipimpin serangan balik militer, juga disajikan sebagai inisiatif

¹Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History* - University of Michigan. 2012

heroik untuk menyelamatkan negara tidak hanya dari komunisme, tetapi juga kekacauan dan disintegrasi. Hal ini penting untuk menyadari di sini bahwa dalam banyak kasus bahwa militer hanya sudah mendorong pembunuhan, yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter dan warga sipil.²

Pembunuhan sudah ada ditujukan bagi anggota Partai Komunis, namun siapa pun dengan asosiasi sedikit dengan komunisme juga target dan banyak orang tewas hanya karena takut meskipun mereka mungkin tidak memiliki simpati komunis. Ini rasa anti-komunisme ditanamkan oleh Orde Baru, dan ini telah baik bertahan lebih lama daripada Orde Baru itu sendiri. sehingga ini juga berdampak pada inisiatif hak asasi manusia di Indonesia di era reformasi. Salah satu bidang utama yang memfasilitasi kelanjutan ini retorika anti-komunis adalah sistem pendidikan yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak Orde Baru.³

1.2 Tujuan dari Penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang saya cari penjawab dalam penelitian ini, adalah dapat pendidikan hak asasi manusia membantu rekonsiliasi? Mengapa kesadaran untuk pendidikan hak asasi manusia disalah pahami? Bagaimana pemerintah Indonesia telah sukses berada di advokasi hak asasi manusia? Apakah dampak, kemungkinan, akan perubahan dalam pola pikir hak asasi manusia yang akan

²Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012.

³*Ibid.*

dimiliki untuk masyarakat Indonesia? Pembunuhan ini tidak hanya mengakibatkan kematian ratusan ribu orang tetapi juga berdampak pada masyarakat Indonesia dalam berbagai hal lain yang terus terjadi sampai sekarang.

Para keluarga korban yang sebagian besar terus didiskriminasi dan ribuan tahanan politik yang sudah dipenjarakan juga menemukan kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Diskriminasi ini terhadap PKI dan orang-orang yang terkait dengan itu berlanjut di masa reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. PKI sebagian besar masih disalahpahami oleh mayoritas orang di masyarakat Indonesia dan terus dilihat sebagai ideologi berbahaya yang mengancam kesatuan bangsa.

1.3 Pembeneran untuk Studi Tersebut.

Isu dari pembunuhan di masyarakat Indonesia pasca-1998 adalah penting karena pertanyaan itu menimbulkan tentang bagaimana masyarakat mengingat peristiwa, dan dampak mengingat ini terhadap masyarakat saat ini. Hal Ini termasuk masalah dengan bagaimana masyarakat mengingat peristiwa traumatis, bagaimana pengetahuan dihasilkan, dan legitimasi berbagai kisah dan kredibilitas dari fakta. Memori budaya mengacu pada gagasan bahwa memori tidak hanya pribadi tetapi sangat dipengaruhi oleh alam komunal di mana kita hidup.

Meskipun memori budaya sudah menjadi kurang terpusat karena munculnya liberalisasi dan media yang bebas, hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang

diinginkan. Baskara Wardaya berpendapat "narasi sejarah tidak dibuat untuk diri sendiri ... Hal ini dibuat untuk tujuan tertentu."⁴ Sangat penting untuk menyadari bahwa itu hanya 17 tahun sejak jatuhnya rezim Soeharto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) merilis laporan pada tahun 2012, yang menunjukkan seberapa jauh Indonesia telah datang dalam hal berurusan dengan memori pembunuhan dalam waktu singkat.⁵

Namun patut dipertanyakan apakah momentum ini akan terus diberikan pembatasan meningkat ditempatkan pada komisi, dan kelanjutan elemen-elemen dari era Soeharto yang menunjukkan kebencian terhadap meninjau pembunuhan. Teka-teki ini tidak unik untuk Indonesia dan mencerminkan kecenderungan umum di masyarakat pasca-otoriter yang harus berurusan dengan isu-isu hak asasi manusia dari masa lalu.

Untuk keperluan makalah ini, hak asasi manusia akan ditentukan menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Definisi ini digunakan, karena Indonesia adalah anggota PBB dan penandatanganan inisiatif hak asasi manusianya. Hak asasi manusia didefinisikan oleh PBB sebagai,

"Sebuah standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, sampai akhir bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, menjaga

⁴Baskara Wardaya. *Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence*. Clayton: Monash University Publishing, 2013

⁵Yenni Kwok. "Movie, Books Push Indonesia to Confront Its Bloody Past." *Time Magazine*, 7 February 2013

Deklarasi ini terus-menerus dalam pikiran, akan berusaha dengan pengajaran dan pendidikan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dan langkah-langkah progresif, nasional dan internasional, untuk menjamin pengakuan universal dan efektif dan ketaatan, baik antar bangsa Anggota Serikat sendiri dan di antara bangsa-bangsa wilayah di bawah yurisdiksi mereka. "6

1.4 Metodologi.

Makalah ini berfokus pada perlawanan terhadap hak asasi manusia, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam kontemporer Indonesia. Makalah ini akan fokus pada pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965-66 dan penggambaran mereka dalam masyarakat modern. Penelitian saya akan sebagian besar didasarkan pada pendekatan kualitatif karena saya percaya ini menjadi yang paling cocok untuk analisis saya. Penelitian saya dilakukan terutama melalui wawancara observasi dan semi-terstruktur dengan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan dan hak asasi manusia di Indonesia. Selama penelitian lapangan, saya akan menjelajahi konteks lokal Indonesia dan mencoba untuk menafsirkan sikap untuk masyarakat setempat. Oleh karena itu penelitian saya terlibat pengamatan, interpretasi dan pengawasan dari sumber yang relevan.

⁶United Nations (2015). *The Universal Declaration of Human Rights [on line]*, tersedia di <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>

Makalah ini akan bergantung terutama pada wawancara dengan orang Indonesia dan juga pilih individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dari isu yang terlibat. Saya mewawancarai banyak orang muda Indonesia, karena pentingnya mereka sebagai pemimpin masa depan dan pilih individu telah dipilih berdasarkan pengetahuan dan perspektif tentang pembunuhan dan implikasinya mereka. Orang-orang ini akan membantu untuk menggambarkan tren secara keseluruhan di masyarakat Indonesia terhadap pembunuhan, yang kemudian dapat kontras dengan apa yang saya pelajari dari sumber-sumber akademik.

Meskipun pendekatan yang lebih kuantitatif yang melibatkan survei mungkin telah membuat lebih mudah untuk menggeneralisasi temuan saya, saya percaya pendekatan seperti itu akan membuatnya sulit untuk mengukur ketahanan terhadap isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Sebuah survei hanya akan memberi jawaban yang sempit, dan tidak memuaskan dalam menjelaskan pemahaman dan sikap orang terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Isu ini kompleks dan multi-faceted yang tidak bisa ditunjukkan kiasan di atas kertas. Oleh karena itu survei menurut saya menawarkan wawasan yang sangat terbatas ke dalam realitas hak asasi manusia di Indonesia. Penggunaan wawancara informal memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan kontemplasi, sehingga mengarah ke diskusi yang lebih mendalam dengan narasumber dan sentimen mereka tentang masalah ini.

Penelitian ini merupakan studi kasus dari negara tunggal karena saya ingin menjelajahi fenomena sosial tertentu pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Saya memilih Indonesia karena dari program sarjana saya, dan juga hasil yang tinggal di negara itu selama beberapa bulan. Fakta bahwa ada sentimen bervariasi dan rumit menuju hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia membuat negara ini bagus untuk studi. Jumlah waktu saya harus melakukan penelitian juga memberikan kontribusi terhadap pilihan untuk fokus khusus pada Indonesia. Ini akan memperbolehkan fokus saya dari konteks Indonesia, namun kasus Indonesia tidak unik dan negara lain memiliki isu-isu mirip.

Saya juga akan menggunakan sejumlah besar bahan sekunder karena fakta bahwa topik saya adalah kontemporer dan telah menjadi agak dipopulerkan di Indonesia. Saat ini sudah banyak yang diterbitkan tentang 1965 pembunuhan baik oleh sumber domestik maupun internasional. Namun banyak sumber ini tidak fokus pada implikasi bagi masyarakat Indonesia modern. Ada telah sangat sedikit ditulis tentang pentingnya bagaimana sejarah diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini adalah daerah penting karena pikiran anak-anak masih berkembang dan itu pada tahap ini di mana proses berpikir mereka yang paling rentan.

Saya akan memiliki kesulitan ketika berkenaan dengan mewawancarai orang karena cara Orde Baru sentimen terus berlaku di banyak daerah masyarakat, banyak orang mungkin tidak ingin berbicara tentang topik karena sifat tabu nya. Lebih penting lagi, sebagai hasil dari ini mereka mungkin hanya tidak peduli

tentang implikasi dari pembunuhan dan tidak bisa mengerti mengapa perspektif yang berbeda perlu dieksplorasi, terutama yang berkaitan dengan komunisme. Bagi banyak orang Indonesia yang saya temui tampaknya ada keyakinan hampir naif bahwa komunisme hanya salah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua orang Indonesia memiliki perspektif seperti itu, dan saya telah bertemu banyak yang mempertanyakan gagasan umum yang diselenggarakan terhadap komunisme. Namun pada umumnya ini masih minoritas dibandingkan dengan kebanyakan orang yang saya temui di Indonesia yang terus percaya ide-ide era Orde Baru.

Oleh karena itu meskipun banyak orang Indonesia di universitas memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide alternatif, mereka masih sangat dipengaruhi oleh tahun-tahun formatif mereka di sekolah. Juga yang lebih penting tidak semua orang Indonesia memiliki kesempatan untuk menghadiri universitas dan mengeksplorasi isu-isu hak asasi manusia lebih lanjut. Pengalaman awal di sekolah tidak mungkin hanya memberi mereka perspektif yang sempit terhadap pembunuhan, tetapi juga memupuk keyakinan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengeksplorasi acara secara lebih rinci. Jadi meskipun beberapa orang Indonesia dapat diberikan kesempatan di universitas mempertanyakan pembunuhan, banyak dapat memilih untuk tidak atau bahkan hanya tidak peduli, karena pengalaman mereka sebelumnya di sekolah. Mayoritas masyarakat Indonesia masih sebagian besar ditandai dengan waktu dalam sekolah lokal mereka. Ini mungkin satu-

satunya pendidikan yang mereka terima, yang mengapa sangat penting bahwa mereka menerima pendidikan hak asasi manusia yang cukup pada tingkat ini.

2 Sikap Utama dalam Masyarakat Indonesia Menuju Isu dari Pembunuhan pada 1965-66

2.1 Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada zaman sekarang.

Kelanjutan dari sentimen anti-komunis dalam masyarakat Indonesia sebagian dapat dijelaskan melalui sistem pendidikan yang terus mendorong era Orde Baru retorika dengan implikasi yang berlangsung selama masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini sebagian besar ditandai dengan kurangnya pemikiran kritis dan perhatian cukup untuk hak asasi manusia. Makalah ini akan berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah dalam proses rekonsiliasi sangat penting, khususnya di bidang hak asasi manusia. Saya mengusulkan bahwa berpikir kritis perlu dimasukkan ke dalam kurikulum, terutama menuju pembunuhan sehingga perdebatan dan berbagai perspektif dapat difasilitasi. Kurikulum Indonesia sejauh ini telah berubah sedikit, jika ada, sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Namun jika sikap dapat berubah ke arah pembunuhan, maka perubahan perlu dibuat di tingkat akar rumput.

Pemerintah perlu berperan dalam hal ini bukan hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk menegakkan seperti perubahan yang mendalam, tetapi juga karena

mereka dapat memberikan semacam legitimasi di mata masyarakat Indonesia. Apalagi sejak jatuhnya Suharto, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa itu akan istirahat dari praktek-praktek otoriter masa lalu melalui proses demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia. Namun ada memprihatinkan di beberapa daerah, yaitu pendidikan. Tampaknya ada kesenjangan yang cukup besar antara komitmen normatif dan mekanisme penegakan hukum. Ada banyak kebijakan yang belum dilaksanakan atau dibatalkan, karena pelaksanaan ditambah ada kecenderungan kebijakan lokal untuk tidak memenuhi standar nasional. Hal ini terjadi walaupun pengakuan yang lebih luas dari hak asasi manusia dalam pendidikan dan pekerjaan organisasi seperti KOMNAS HAM.⁷

Kurikulum sebagian besar masih nasionalistik dan kejur, dan masih terus menggambarkan hanya satu interpretasi terhadap pembunuhan di 1965-1966. Interpretasi ini menjadi narasi resmi seluruh rezim Orde Baru, yang menempatkan semua kesalahan untuk "kudeta" pada PKI. PKI digambarkan sebagai ancaman bagi bangsa yang harus dihilangkan dan bahwa hal itu bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Asumsi ini tidak hanya berdasar tetapi juga dapat menyebabkan rasa palsu takut yang pada akhirnya mengarah pada ruam tindakan. Masyarakat Indonesia tidak hanya menjalankan risiko yang tersisa di sebuah pola

⁷Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

pikir Perang Dingin di masa depan, tetapi juga mengancam reputasinya sebagai negara yang mendukung pluralisme dan toleransi.⁸

2.2 "Kudeta" adalah asal Rezim Orde Baru.

"Kudeta" 1965 adalah terbaik dipahami sebagai dua kudeta, Kudeta Untung (juga dikenal sebagai G30-S) dan Suharto kontra kudeta. Kudeta pertama dinamakan demikian karena itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri. The Untung kudeta yang terlibat eksekusi enam jenderal dari Komando Tinggi Angkatan Darat dan pembentukan "Dewan Revolusi." Dalam kudeta kedua, Mayor Jenderal Soeharto hancur kudeta Untung dan mendirikan dominasi perwira militer anti-PKI di bawah kepemimpinan Soeharto memimpin kudeta kontra. Meskipun kudeta Untung memiliki akar dalam konflik intra-militer, pasukan Suharto mulai menggambarkan peristiwa ini sebagai plot berbahaya terhadap bangsa yang dipimpin oleh PKI.⁹

Anggapan ini menjadi dasar dan pembenaran untuk kampanye berikutnya untuk menghancurkan PKI dan juga terletak di pusat klaim rezim Suharto untuk legitimasi politik. Ada sangat sedikit bukti bahwa PKI mendalangi kudeta dan jika terlibat, ini mungkin menjadi peran kecil. PKI secara keseluruhan tampaknya tahu

⁸Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

⁹Geoffrey Robinson. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali (Asia East by South)*. Ithaca: Cornell University Press. Reprint Edition, 1998.

sedikit tentang kudeta itu sendiri dan di paling mungkin hanya pejabat PKI beberapa terlibat.¹⁰

Penganiayaan besar dan pembunuhan anggota PKI termasuk banyak tanpa, atau sangat kecil, hubungan dengan PKI. Kekerasan baik melampaui konflik awal antara PKI dan tentara, dan dalam banyak kasus tentara hanya memfasilitasi pembunuhan itu. Menurut Andrew Conroe, pemerintah Indonesia tidak menyimpan catatan diandalkan jumlah orang yang tewas atau dipenjara, banyak yang dikirim ke koloni pidana. Mereka dipenjara sering ditahan selama beberapa tahun dan meskipun banyak yang dirilis karena tekanan internasional dengan tahun 1970-an, setelah kembali masyarakat, mereka masih diskriminasi oleh negara. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor tertentu dan mengakses kesempatan pendidikan tertentu, ditambah itu juga memiliki dampak yang mendalam pada keluarga mereka.¹¹

Identitas tahanan eks-politik sulit untuk menyembunyikan, karena fakta bahwa mereka harus menampilkan status ini pada kartu identitas mereka dan keluarga mereka dianggap ideologis tersangka oleh asosiasi. Mereka menghadapi jumlah yang sama dari diskriminasi dan sering dikucilkan dalam komunitas mereka sendiri. Rezim Orde Baru sehingga telah menciptakan link antargenerasi antara tahanan politik dan anak-anak mereka yang telah memiliki konsekuensi

¹⁰Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

¹¹*Ibid.*

abadi. Meskipun kurang begitu hari ini dibandingkan dengan masa Orde Baru, ada terus menjadi diskriminasi terhadap siapa pun jauh terkait dengan PKI, apakah mereka adalah mantan anggota atau keluarga anggota PKI.¹²

Fakta bahwa komunisme tetap menjadi topik tabu dalam masyarakat Indonesia karena konotasi negatif, ini salah yang memperkuat kebutuhan untuk rekonsiliasi. Negativitas menuju komunisme memiliki dalam banyak kasus menjadi begitu mendarah daging bahwa dalam banyak kasus itu telah hanya menjadi alat politik yang digunakan untuk menodai kredibilitas lawan politik atau individu, meskipun fakta bahwa mereka sering tidak memiliki mandat komunis apapun.

2.3 Anti-komunisme dan Konflik di Indonesia.

Pentingnya rekonsiliasi tidak hanya bagi Indonesia untuk membangun dirinya sebagai negara modern, tetapi juga penting bagi kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Negara ini terus ditandai dengan krisis dan meskipun tidak mungkin, banyak takut bahwa disintegrasi bisa menjadi kenyataan. Ada yang bisa dibilang tidak ada yang kuat atau signifikan kelompok lobi dalam atau di luar Indonesia mendorong rekonsiliasi sehubungan dengan pembunuhan. Katherine McGregor menekankan bagaimana akar kunci untuk masalah ini adalah bahwa masih belum ada konsensus umum tentang sudah apa yang terjadi di periode yang memalukan

¹²Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

dalam sejarah Indonesia.¹³ Ini mengakibatkan tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap mengatasi masa lalu dengan cara hukum. Hal ini terutama jelas dalam pemerintah Indonesia dimana isu-isu hak asasi manusia sebagian besar hilang dari agenda politik; bukannya fokus lebih pada korupsi dan pendidikan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa isu-isu tersebut tidak penting, tetapi tampaknya bahwa pemerintah Indonesia memberikan lagi perhatian yang cukup terhadap upaya rekonsiliasi. Banyak orang bertanya-tanya apakah pemerintah bahkan peduli tentang mengubah konsensus umum terhadap pembunuhan dan implikasinya.

Tanggapan pemerintah terhadap laporan yang dirilis oleh KOMNAS HAM tahun 2012 mungkin adalah indikator terbesar dari sentimen ini. Namun pada saat yang sama banyak pejabat pemerintah tidak hanya menolak untuk mendukung upaya rekonsiliasi, tetapi juga sering secara terbuka membela pembunuhan dan narasi Orde Baru dari acara ini. Contoh ini ditunjukkan oleh kemudian Menko politik, hukum dan keamanan urusan, Djoko Suyanto.¹⁴ Dia menolak laporan mengklaim bahwa pembunuhan itu dibenarkan untuk menyelamatkan negara dari komunisme. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berjanji permintaan maaf dan mekanisme untuk membantu para korban, namun tidak ada yang datang dari klaim ini. SBY juga diduga mengatakan kepada confidants bahwa tindakan seperti

¹³Katharine McGregor, "The Indonesian Killings of 1965-66." *Online Encyclopedia of Mass Violence, SciencesPo*.2009

¹⁴James Balowski. "Yudhoyono government says 1965 murders 'saved' Indonesia." *Direct Action – For Socialism in the 21st Century*, 22 October 2012.

itu merupakan bagian dari "warisan" nya masa jabatannya, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak pernah tulus tetapi hanya politik.¹⁵

Sentimen ini telah menjadi bahkan lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir sebagai dua film utama tentang pembunuhan, *The Act of Killing* dan *The Look of Silence*, belum memiliki rilis resmi di Indonesia dan pemutaran swasta masih terus menjadi terganggu.¹⁶ KOMNAS HAM mengenai laporan tentang pembunuhan yang didasarkan pada beberapa tahun penelitian dan menyatakan bahwa sudah pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah dalam hal menangani masalah ini. Saran ini ditolak oleh kantor Kejaksaan Agung dan masih tidak ada tindakan oleh pemerintah menuju penanganan laporan temuan.¹⁷ Kurangnya perhatian terhadap rekonsiliasi di tingkat resmi juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan di mana kurikulum sekolah sebagian besar masih kaku dan nasionalistik. Ini adalah daerah ini yang saya percaya adalah yang paling penting dalam mengatasi masalah karena ini adalah di mana pendidikan dimulai untuk masyarakat Indonesia dan bisa dibidang salah satu akar utama masalah.

Meski telah hampir 50 tahun sejak pembunuhan terjadi dan 17 tahun sejak berdirinya periode reformasi, komunis masih digambarkan di sekolah sebagai ancaman yang harus dihilangkan dan ada sedikit di jalan perspektif alternatif.

¹⁵James Balowski. "Yudhoyono government says 1965 murders 'saved' Indonesia." *Direct Action – For Socialism in the 21st Century*, 22 October 2012.

¹⁶Grace Leksana. "Silencing the Look of Silence." *Inside Indonesia*, January-March 2015.

¹⁷James Balowski. "Yudhoyono government says 1965 murders 'saved' Indonesia." *Direct Action – For Socialism in the 21st Century*, 22 October 2012.

Yang penting dalam situasi ini tidak untuk memberikan siswa dengan perspektif sepihak baru, melainkan untuk mendorong perdebatan dan menyadari bahwa sejarah tidak satu dimensi. Adalah penting bahwa orang tidak membabi buta percaya narasi tertentu, karena mendapat dukungan dari pemerintah, sehingga oleh karena itu penting untuk mendorong skeptisisme yang sehat. PKI masih tertanam dalam buku pelajaran sekolah dan acara 1965 masih disebut sebagai G30S / PKI bukan G30S. Ada sudah perubahan dalam kurikulum yang memungkinkan untuk perspektif alternatif pada tahun 2004, tapi ini terbalik pada tahun 2006.¹⁸

Jaksa Agung memerintahkan pelarangan buku-buku ini dan kembalikan kurikulum 1994 yang menekankan versi dari rezim Orde Baru. Hal ini disebabkan tekanan besar dari kelompok anti-komunis, terutama dengan militer dan Islam dan mengakibatkan pembakaran ribuan buku-buku sejarah. Kelompok-kelompok ini mengklaim bahwa buku terhadap diterima kebenaran dan bisa menciptakan kekacauan publik.¹⁹ Franz Magnis-Suseno sudah berpendapat bagaimana ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak siap menangani isu-isu hak manusia.²⁰ Sistem pendidikan adalah sangat penting karena merupakan tempat anak-anak akan dididik dan belajar untuk menjadi pemimpin masa depan.

¹⁸Mark Forbes. "Indonesian academics fight burning of books on 1965 coup." *The Sydney Morning Herald*, 9 August 2007.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mark Forbes. "Indonesian academics fight burning of books on 1965 coup." *The Sydney Morning Herald*, 9 August 2007.

Orang harus diajarkan untuk berpikir kritis tentang peristiwa sejarah dan mempertanyakan keasliannya, karena ada resiko nyata bahwa generasi yang akan sikap-sikap yang sama. Hal ini pada usia ini ketika anak-anak yang paling rentan terhadap indoktrinasi dan jitu mereka apa yang harus berpikir dapat memiliki dampak yang kuat pada proses berpikir mereka. Mereka malah harus diajarkan untuk berpikir kritis dan terlibat dengan semua sisi masalah ini sebelum tiba pada kesimpulan pada merit mereka sendiri. Banyak anak muda Indonesia telah saya tanyai sebuah pendapat, dengan hanya mengabaikan komunisme sebagai salah, karena apa yang mereka sudah diajarkan tetapi mereka tidak dapat inheren memberitahu saya mengapa itu salah.

2.4 Rekonsiliasi Gerakan pada Dua Tingkat.

Gerakan rekonsiliasi tampaknya terjadi pada dua tingkat, tingkat masyarakat dan tingkat resmi. Menurut Imam Aziz, anggota dewan NU dan kepala Yogyakarta berbasis LSM bernama Syarikat, pemerintah telah berbuat banyak sejauh ini bagi rekonsiliasi, namun telah terjadi peningkatan aktivitas sipil terhadap masalah ini.²¹ Sekarang ada banyak LSM seperti Syarikat yang membantu untuk merekam kenangan dan mendorong perdebatan tentang implikasi dari pembunuhan. Aziz berpendapat bahwa pemerintah belum siap untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi, namun gerakan sipil akan terus membantu proses rekonsiliasi. Ada

²¹Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

banyak perdebatan tentang apa sebenarnya berarti dari rekonsiliasi dan apa gulungan pemerintah harus dalam proses ini.²²

Untuk keperluan makalah ini definisi dari rekonsiliasi saya akan memberikan adalah bahwa itu adalah proses yang mengungkapkan kesalahan masa lalu dengan harapan menyelesaikan konflik yang tersisa dari masa lalu. Selain menawarkan legitimasi, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam proses ini dengan menyediakan sumber daya dan dorongan terhadap proses. Dengan kata lain, dukungan pemerintah untuk rekonsiliasi akan membantu menyelesaikan masalah serius di masyarakat dan membantu kelompok-kelompok sipil untuk menjadi lebih vokal tentang pekerjaan mereka. Pada saat ini, kurangnya dukungan pemerintah membuat sulit bagi topik untuk fitur menonjol dalam agenda publik dan dengan demikian banyak aktivitas terjadi jauh dari mata publik. Ini berarti bahwa banyak orang tetap tidak menyadari masalah ini atau tidak ingin menjelajahi topik karena takut pengucilan.

Sifat anti-komunis ide di Indonesia modern juga menimbulkan pertanyaan tentang apa jenis negara Indonesia ingin menjadi dan bagaimana digambarkan di panggung dunia. Indonesia sering digembar-gemborkan sebagai demokratis dan pluralis, namun pada saat yang sama, banyak sistem kepercayaan tertentu dan afiliasi politik tidak diperbolehkan.²³ Misalnya, Yudaisme yang merupakan salah satu agama besar dunia tetapi tidak resmi diakui oleh negara Indonesia. Lebih

²²Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015..

²³“Obama Praises Indonesia for Democracy.” *Tempo Magazine*, 10 November 2014

penting lagi, komunisme tetap ilegal meskipun fakta bahwa Perang Dingin berakhir bertahun-tahun lalu dan banyak orang Indonesia tidak bisa menunjukkan mengapa komunisme bertentangan dengan ideologi negara. Ini tetap menjadi alat politik yang dapat digunakan untuk menanamkan rasa takut dan mencemarkan nama baik orang, yang dapat dilihat melalui tuduhan komunis diarahkan pada Joko Widodo di pemilihan presiden tahun lalu.²⁴

Meskipun banyak mengklaim bahwa revisi terhadap peristiwa sejarah bisa menyebabkan kebangkitan komunisme, ini sangat tidak mungkin mengingat bahwa Perang Dingin berakhir. Ditambah bahkan jika partai politik komunis baru ada terjadi di Indonesia, tidak akan bertindak secara berbeda dari partai-partai politik lainnya. Ia akan muncul bahwa sebagian besar banyak orang Indonesia terus memiliki sentimen anti-komunis karena mereka diajarkan untuk takut komunisme begitu lama di bawah rezim Orde Baru. Sulit untuk mengubah sikap yang telah menjadi sangat tertanam setelah bertahun-tahun propaganda, yang terus hari ini. Dengan demikian, penting untuk menyerang masalah ini di hati, yang menurut saya adalah sistem pendidikan. Hal ini tidak hanya akan memperkenalkan perspektif baru, tetapi juga menunjukkan masyarakat Indonesia bahwa pemerintah serius rekonsiliasi.

²⁴Vannessa Hearman. "Spectre of anti-communist smears resurrected against Jokowi." *The Conversation*, 4 July 2014

Fakta bahwa sentimen tersebut sebagian besar telah bertahan dalam periode pasca-Orde Baru menunjukkan berapa propaganda anti-komunis telah menjadi tertanam dalam masyarakat Indonesia. Hal ini terus digunakan untuk tujuan politik dan juga sebagian besar disalahpahami, khususnya di kalangan generasi muda. Misalnya, dalam memimpin hingga pemilihan presiden tahun lalu yang berharap presiden Joko Widodo dituduh sebagai komunis oleh rival politiknya meskipun sifat absurd tuduhan tersebut.²⁵

Salah satu justifikasi kunci yang diberikan untuk sentimen anti-komunis adalah bahwa itu masih bertentangan Pancasila, yang merupakan dasar ideologis bagi negara Indonesia. Hal ini disebabkan asumsi bahwa komunisme sama dengan ateisme dan ini akan berarti bahwa komunis adalah musuh agama karena Pancasila membutuhkan kepercayaan pada Tuhan. Pancasila adalah serangkaian lima pelaku yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1945. Mereka adalah keyakinan dalam satu Tuhan, kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi dan persatuan nasional.²⁶

2.5 Kesalahpahaman tentang Komunisme.

Orde Baru narasi bertentangan dengan fakta bahwa sebelum ada koeksistensi antara kelompok Islam dan kiri, dan banyak umat Islam yang taat ada anggota

²⁵Vannessa Hearman. "Spectre of anti-communist smears resurrected against Jokowi." *The Conversation*, 4 July 2014

²⁶Benyamin Fleming Intan. *"Public Religion" and the Pancasila-based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. Bern: Peter Lang, 2006

PKI. Ada tampaknya tidak ada titik asal untuk asumsi bahwa PKI adalah atheis. Greg Fealy, dari Universitas Nasional Australia, telah mengatakan bahwa meningkatnya ketegangan antara PKI dan kelompok Islam di tahun 1940-an dihasilkan dari hal-hal ekonomi dan politik, bukan agama.²⁷ Posisi dari PKI menuju agama sampai kehancurannya pada tahun 1965 adalah bahwa agama adalah pilihan pribadi dan mereka tidak pernah terhadap Islam atau agama lain secara keseluruhan. Hanya menentang pemimpin agama tertentu berdasarkan praktek mereka jelas eksploitatif ekonomi, bukan afiliasi agama mereka. Konflik ini yang awalnya tentang isu politik dan ekonomi, tetapi mengambil dimensi agama karena simbol-simbol agama adalah sangat kuasa dalam masyarakat Indonesia.²⁸

PKI pada awalnya didirikan pada tahun 1920 dan sudah memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, termasuk pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Belanda pada tahun 1926. PKI hancur pada tahun 1948 setelah pemberontakan yang gagal di kota Madiun dan ini sudah membuat konflik dengan kelompok nasional lain. Namun partai mengalami reformasi di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit dan memenangkan 16% suara dalam pemilu 1955 nasional. Partai ini kemudian tumbuh lebih besar dan kuat sebagai bagian dari program "Demokrasi Terpimpin" oleh Presiden Sukarno. Pada

²⁷Greg Fealy and Katharine McGregor. "Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics and Remembrance." *Indonesia*, Issue 89, pp. 35-60. 2010

²⁸*Ibid.*

1960-an mereka telah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia dan partai politik kuat dalam Indonesia.²⁹

Program ini ditunjukkan melalui konsep politik yang diciptakan oleh Soekarno dikenal sebagai Nasakom, yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama dan komunisme. Konsep ini seharusnya bercampur tiga faksi utama pada politik Indonesia, tentara, kelompok-kelompok Islam dan komunis. Sukarno telah menciptakan konsep ini pada tahun 1956 karena gagasan bahwa konflik itu terjadi di negara, yang berlawanan dengan gagasan harmoni sebagai keadaan alami hubungan manusia.³⁰

PKI sudah telah mengembangkan peran yang sangat berpengaruh dalam politik Indonesia pada 1960-an dan ini membuat ketegangan meningkat antara PKI dan tentara. Ada juga antagonisme lebih besar antara PKI dan kelompok-kelompok sipil, seperti organisasi-organisasi Muslim, tuan tanah kaya dan partai-partai nasionalis. Tentara mulai merasa bahwa posisi politik mereka berada di bawah ancaman dan kelompok-kelompok sipil tidak setuju dengan kampanye reformasi tanah yang sedang diperkenalkan oleh PKI. Ketegangan ini membuatnya mudah bagi Soeharto untuk meminggirkan PKI menyusul kudeta pada tanggal 30 September 1965 dan tidak hanya memungkinkan Suharto untuk menghapus

²⁹Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

³⁰Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

ancaman politik, tetapi juga membangun kerangka bagi rezim Orde Baru. Kerangka kerja ini adalah salah satu yang ditandai dengan rasa takut seperti siapa pun yang terkait dengan komunisme adalah dianiaya. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kematian ratusan ribu orang tetapi juga diskriminasi terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI, yang masih terus hari ini.³¹

Pengkhianatan GSOs / PKI adalah film pertama yang dibuat tersedia untuk masyarakat Indonesia tentang "kudeta" dan implikasinya. Filem ini telah dilihat oleh banyak akademisi, seperti Ariel Heryanto, sebagai propaganda pemerintah murni menganjurkan versi Orde Baru dari kudeta yang mengarah pada pembentukan rezim Orde Baru.³² Film ini berlangsung selama hampir 5 jam dan terutama berkaitan dengan peristiwa dari 30 September-5 Oktober 1965. Film ini termasuk banyak informasi salah, terutama tentang orang-orang PKI yang menunjukkan sebagai setan dan berbahaya.

Ketika film ini awalnya dirilis pada tahun 1984, itu dibuat menonton wajib di sekolah-sekolah dan juga disiarkan setiap tahun di televisi negara setiap tanggal 30 September. Ini terus sampai tahun-tahun terakhir rezim Orde Baru dan stasiun televisi swasta juga siaran film. Heryanto berpendapat bahwa tidak mungkin bahwa setiap konsensus umum akan pernah dicapai berkenaan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pentingnya acara terletak

³¹Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

³²*Ibid.*

lebih dalam apa yang datang setelah ketika pembunuhan mulai dan rezim Orde Baru didirikan.³³

2.6 Kelanjutan dari Narasi Orde Baru di masyarakat Indonesia.

Sepanjang tahun 1990-an Orde Baru mulai mengalami perubahan sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1998. Ada sudah rasa harapan ketika Orde Baru runtuh, dan bahwa Indonesia akan mengalami perubahan signifikan, paling tidak dalam hal-hal mengenai Perang Dingin. Meskipun ada perubahan besar-besaran melalui kebijakan desentralisasi selama periode reformasi segera menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, banyak karakteristik dari masa Orde Baru tetap di tempat. Lebih khusus dengan kaitannya dengan G30s/PKI, dan masih ada sentimen anti-komunis. Ada beberapa orang yang berpendapat ini telah pada kenyataannya menjadi lebih tegas dalam beberapa kasus. Ini adalah meskipun Perang Dingin sudah berakhir lebih dari dua puluh tahun yang lalu, dan Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia modern yang masih mana ada lingkungan Perang Dingin tersebut.

Masyarakat Indonesia telah dimasukkan dalam posisi yang berpikir tanpa henti ke depan, dan aktivitas moral dan politik tergantung mereka lupa masa lalu daripada kembali melibatkan dengan itu. Conroe telah menunjukkan bagaimana walaupun sudah ada sejumlah besar perdebatan dan diskusi tentang dampak dari pembunuhan setelah 1998, lebih banyak dari ini telah dilakukan oleh akademisi

³³Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

asing. Juga, banyak fokus telah menuju kenangan dan kesaksian daripada pemuda dan anak-anak dari mantan tahanan politik. Dokumentasi masa lalu adalah hal yang penting, namun hal ini juga penting bahwa kenangan ini secara memadai disampaikan pada masyarakat.³⁴

Acara ini adalah topik yang tragis dan sensitif bagi banyak orang Indonesia namun masyarakat perlu terlibat dengan topik jika tidak hanya demi masa depan negara. Sikap naif terhadap pembunuhan dan implikasinya menjalankan risiko yang tidak hanya akan sikap seperti menang jangka panjang, tetapi juga bahwa peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Ini ada suatu bahaya kecil mengingat keragaman Indonesia dan sejumlah isu konflik itu harus berurusan.

Dalam hal ini bukan untuk mengatakan bahwa setiap orang di Indonesia masih naif terhadap isu-isu yang terkait dengan acara ini, namun banyak dari akademisi dan materi tentang masalah ini tetap tersedia untuk hanya sebagian kecil dari populasi. Ini persentase orang yang sebagian besar berpusat pada akademisi, mahasiswa dan kelas menengah. Namun banyak orang Indonesia masih akan menghindari bahan tersebut karena keengganan mereka menuju sesuatu yang melekat dengan komunisme. Pun demikian di kota-kota besar dan kampus universitas di mana materi akademik alternatif mungkin tersedia, banyak orang memilih untuk menghindari bahan tersebut, karena disposisi yang sebelumnya mereka bahwa mereka memiliki tentang topik.

³⁴Andrew Marc Conroe. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

Sistem pendidikan yang sebagian besar masih nasionalis, dan tidak berubah dibandingkan dengan rezim Orde Baru, ada sedikit ruang untuk menjelajahi perspektif alternatif. Ada juga banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa ada perspektif alternatif yang tersedia. Di sisi lain mereka juga tidak peduli tentang "apa yang sebenarnya terjadi" dan setiap keterlibatan dengan topik mungkin tampil sebagai sia-sia. Hal ini pada akhirnya membawa kita pentingnya sejarah, bahkan jika hanya untuk kepentingan itu tidak terulang. Tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi adalah tragis, tetapi jika orang tidak meninjau kembali masalah ini, itu bisa memiliki implikasi yang jauh lebih besar bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu sangat penting bahwa perubahan terhadap sistem pendidikan terjadi dalam rangka memfasilitasi perspektif alternatif dan perdebatan terhadap pembunuhan di 1965-1966.

3 Misa Pembunuhan di Kurikulum di Indonesia

3.1 Kurangnya pengakuan dalam Sistem Pendidikan.

Belajar sejarah di sekolah adalah penting karena fakta bahwa ia memberikan rasa ingatan kolektif. Bagi sebagian besar siswa yang belajar sejarah, itu terdiri dari mempelajari satu set narasi dan ini memperkuat gagasan keliru bahwa masa lalu dapat dirampingkan menjadi sampai satu naratif. Semacam ini mengajar mengasumsikan bahwa ada cerita kolektif seragam, sehingga semua orang ingat peristiwa masa lalu yang sama. Sejarah adalah subyek yang bukan hanya

kumpulan fakta yang dianggap "resmi" oleh para sarjana, melainkan merupakan kumpulan perspektif yang berbeda dan adalah sering bertentangan.³⁵

Masalah bagaimana dan apa yang harus mengajar di kelas sejarah sekolah tidak unik untuk Indonesia dan ada banyak perdebatan sekitar masalah. Banyak yang berpendapat bahwa sekolah harus mengajarkan anak-anak poin kunci dan jika mereka ingin menjelajahi lebih jauh maka mereka dapat melanjutkan studi mereka di lembaga yang lebih tinggi, seperti universitas. Namun, dalam Indonesia banyak tidak akan memilih untuk mengeksplorasi lebih lanjut pembunuhan karena mereka mungkin tidak tahu bahwa ada sumber history lain dan kurikulum tidak menempatkan penekanan pada analisis kritis, bukannya mereka terus menegakkan narasi Orde Baru. Iman Aziz, anggota dewan Nahdlatul Ulama (NU) dan kepala organisasi non-pemerintah Syarikat, mengatakan bahwa sistem pendidikan sebagian besar masih kaku dan nasionalistik.³⁶

Hal ini jelas ketika ada kekerasan pada tahun 2007 karena kemudian Jaksa Agung Indonesia (AG) Abdul Rahman Saleh dilarang dan memerintahkan pembakaran buku pelajaran sejarah sekolah.³⁷ Seperti tindakan muncul lebih sesuai dengan masa Orde Baru daripada periode reformasi dan bertentangan dengan era baru kebebasan berekspresi yang telah diduga telah didirikan di Indonesia pasca-Soeharto. Buku-buku ini sudah telah diterbitkan menyusul perubahan kurikulum

³⁵Michael Conway. "The Problem With History Classes – Single-perspective narratives do students a gross disservice." *The Atlantic*, 16 March 2015

³⁶Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

³⁷Mark Forbes. "Indonesian academics fight burning of books on 1965 coup." *The Sydney Morning Herald*, 9 August 2007.

pada tahun 2004 yang memungkinkan untuk perspektif alternatif untuk diajarkan di sekolah-sekolah.

Namun perubahan ini berumur pendek dan kurikulum terbalik kembali pada tahun 2007 setelah pembakaran buku-buku ini. Pada tahun 2012 lalu AG Basrief Arief juga menolak laporan Komnas HAM pada pembantaian di 1965-1966 dan membantah bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi.³⁸ Reaksi pemerintah ini yang terhadap terhadap laporan ini hanya menghambat upaya hak asasi manusia dalam sistem pendidikan, dan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Laporan Komnas HAM itu adalah hasil dari beberapa tahun penelitian dan pengumpulan kesaksian dari banyak korban dan pelaku. Laporan itu membuat beberapa rekomendasi, yaitu bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi di 1965-1966 dan bahwa penyelidikan pemerintah diperlukan. Pemecatan dari laporan ini oleh AG menunjukkan bagaimana isu HAM telah dibagi menjadi dua tingkat di era pasca-Soeharto. Menurut Aziz, inisiatif hak asasi manusia sedang dikejar oleh organisasi sipil, namun di tingkat negara proses hak manusia ini sudah sebagian besar terhenti.³⁹

Aziz berpendapat bahwa pemerintah mungkin akan siap di masa depan untuk memulai proses rekonsiliasi benar. Namun sampai itu, rekonsiliasi perlu terjadi

³⁸Vannessa Hearman. "Violent anti-communism is alive and well in democratic Indonesia." *Rappler*, 9 March 2015.

³⁹Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

pada tingkat tidak resmi. Intinya di sini adalah bahwa masih banyak sisa-sisa era Soeharto dalam masyarakat, yang telah berinvestasi kepentingan dalam mempertahankan status quo. Meskipun prevalensi elemen Orde Baru dalam pemerintahan agak berkurang, ada bahaya bahwa Orde Baru warisan akan tetap di tempat untuk banyak tahun.⁴⁰

Keadaan yang memungkinkan untuk itu perubahan dalam kurikulum antara tahun 2004 dan 2007 adalah kompleks, namun ada beberapa faktor utama yang menjamin perhatian. Pertama, pada tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden terpilih pertama di Indonesia, dan dia ingin memperbaiki demokrasi proses. Acara ini bisa dibilang menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dipasang untuk mengejar proses demokrasi lebih lanjut, termasuk di bidang pendidikan.⁴¹

Kedua, dapat dilihat bahwa pada tahun-tahun sejak 2007 ada bisa dibilang telah stagnasi dalam proses demokrasi dan lebih banyak sentimen menuju konservatisme. Hal ini dapat dilihat melalui agak loyo jabatan kedua SBY setelah dia terpilih kembali pada tahun 2009, yang ditandai dengan upaya stagnan terhadap berbagai isu, yaitu hak asasi manusia. Meskipun SBY menanggukkan

⁴⁰Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

⁴¹Johannes Nugroho. "Johannes Nugroho: After 17 Years of Reformasi, Where Do We Stand? Indonesia's venture into democracy has resulted in very little change in the country's political culture." *The Jakarta Globe*, 20 May 2015

hukuman mati, ia gagal untuk menghapuskan itu sepenuhnya dan dia membuat upaya suram terhadap hak asasi manusia, terutama rekonsiliasi.⁴²

Daerah ini meliputi melanjutkan penganiayaan kelompok minoritas Ahmadiyah oleh kelompok Islam radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI), konflik berlanjut di Papua dan yang lebih penting, kegagalan pemerintah untuk bertindak atas laporan Komnas HAM pada 2012 kurangnya SBY perhatian terhadap daerah-daerah dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi warisan politiknya dan tidak mengganggu kelompok Islam radikal, yang meskipun kecil mereka memiliki suara yang keras. Tampaknya pada waktu itu kelompok Islam radikal menerima perlakuan khusus dari pemerintah karena status mayoritas mereka, namun hal ini bertentangan dengan gagasan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang pluralis. Kelompok Islam ini juga hampir selalu berbicara terhadap komunisme, kadang-kadang dengan kekerasan.⁴³

Kebijakan pemerintah Indonesia seharusnya tidak dipengaruhi oleh satu set tertentu dari keyakinan agama, namun mengakomodasi semua agama yang hidup di Indonesia. Sejak pemilihan Joko Widodo, meskipun semua retorika terhadap hak asasi manusia, situasi telah memburuk bisa dibilang sebagai 14 orang telah dieksekusi dalam enam bulan pertama masa kepresidenannya. Aziz mengatakan bahwa NU, yang berpartisipasi dalam pembunuhan, sekarang lebih bersatu dalam

⁴²Johannes Nugroho. "Johannes Nugroho: After 17 Years of Reformasi, Where Do We Stand? Indonesia's venture into democracy has resulted in very little change in the country's political culture." *The Jakarta Globe*, 20 May 2015

⁴³Vannessa Hearman. "Violent anti-communism is alive and well in democratic Indonesia." *Rappler*, 9 March 2015.

pendekatan terhadap rekonsiliasi.⁴⁴ Namun, Abdurrahman Wahid menjadi terakhir dan hanya presiden untuk mengadvokasi kuat untuk rekonsiliasi, termasuk perubahan terhadap hukum anti-komunis. Ide-ide ini ketemu dengan cepat dengan permusuhan dan Wahid sebagian besar dikutuk sebagai hasilnya.

Maksud saya di sini adalah untuk menunjukkan sikap saat menuju rekonsiliasi dalam pemerintah Indonesia dan bagaimana mereka tidak sejajar dengan tujuan demokratis mereka. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah dibilang mengambil beberapa langkah kembali mengenai hak asasi manusia dengan hukuman mati, menolak laporan Komnas HAM dan oleh kelanjutan dari kekuatan yang tidak perlu di Papua. Ini tidak bisa pertanda baik bagi perubahan menuju komunisme, dan Pemerintah Indonesia masih tidak percaya itu telah melakukan hal yang salah dengan hal hak asasi manusia. Pembunuhan ini sering dirayakan oleh orang pemerintah. Jika sentimen resmi seperti tetap sama, maka sikap menuju hak asasi manusia juga akan cenderung tetap stagnan, sehingga mengancam rencana Indonesia untuk kemajuan berkaitan dengan hak asasi manusia.

3.2 Memahami Ide Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hak-hak manusia sangat penting bagi Indonesia karena negara ini terdiri dari berbagai budaya, dan itu adalah bangsa yang beragam yang sering terlibat dalam konflik. Sifat multikultural Indonesia ditunjukkan melalui motto nasional,

⁴⁴Muhammad Imam Aziz. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

"Bhinneka Tunggal Ika." Tristram Hunt menunjukkan bagaimana kolektif memori membantu memberi orang rasa ruang, waktu dan masyarakat. Rasa memori kolektif bisa sangat kuasa, dan juga cukup sulit ke perubahan.⁴⁵

Dua isu kunci yang terkait dengan acara ini dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah bagaimana mereka sedang digambarkan, dan apa artinya dalam konteks budaya Indonesia. Isu kedua membantu dalam memahami alasan budaya mengapa sulit untuk menerapkan pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia telah memiliki pengalaman sejarah yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain dan ini telah berdampak pada pendekatan hak asasi manusia mereka.

Meskipun berusaha untuk menjadi sistem demokrasi sukses, hal ini masih dalam tahap awal dan sulit untuk mengubah sikap dalam beberapa tahun. Bagi banyak orang Indonesia ide hak asasi manusia adalah sebagian besar masih konsep asing. Selain itu banyak elemen dari orde lama tetap di tempat, dan ini memberikan kontribusi untuk kesulitan dalam memperkenalkan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sejarah.⁴⁶

Aspek kejur dalam kurikulum sejarah berarti bahwa belajar hafalan lebih penting ditekankan daripada analisis kritis. Pelajaran dari sejarah seharusnya tentang

⁴⁵Tristram Hunt. "If we have no history, we have no future." *The Guardian*, 28 August 2011.

⁴⁶Ken Setiawan. "Human Rights for kids." *Inside Indonesia*, April-June 2005

analisis berkurang menjadi kesimpulan yang berarti. Koleksi memori ini yang bagaimanapun tergantung pada kenangan yang dipilih, dan meskipun ada kelompok-kelompok sipil dan LSM yang bekerja dengan korban 1965-66, sistem pendidikan tidak sedikit, jika ada, dalam hal menggambarkan kenangan korban dalam kurikulum.

Namun pertama kurikulum harus mengakui bahwa pembunuhan massal benar-benar terjadi. Meskipun ada banyak bahan lain di mana informasi ini dapat ditemukan, buku pelajaran sekolah tidak menyebutkan pembunuhan massal. Hal ini penting karena bagi banyak orang Indonesia mereka mungkin tidak mengalami topik ini lagi setelah mereka selesai sekolah.⁴⁷

Pembunuhan massal pada tahun 1965-66 telah menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, namun masih disalahpahami dan sangat dipolitisasi dalam masyarakat Indonesia. Grace Leksana telah menekankan bagaimana sistem sekolah selama masa Orde Baru sudah diarahkan berat terhadap indoktrinasi dan meskipun ini mungkin tidak lagi menjadi tujuan di Indonesia modern, ada telah sedikit dilakukan untuk mengubah isi dari kelas sejarah.⁴⁸ PKI disalahkan untuk pembunuhan perwira tentara dan ada pertimbangan minimal diberikan terhadap ratusan ribu orang yang tewas setelah itu. Leksana tidak catatan namun bahwa sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, telah ada lebih

⁴⁷Ken Setiawan. "Human Rights for kids." *Inside Indonesia*, April-June 2005

⁴⁸Grace Leksana. "Silencing the Look of Silence." *Inside Indonesia*, January-March 2015.

banyak diskusi terbuka tentang pembunuhan dan pengawasan yang lebih besar terhadap propaganda negara tentang jangka waktu tersebut.⁴⁹

Sayangnya ini belum tercermin dalam kurikulum nasional, yang terus menggambarkan narasi Orde Baru peristiwa. Pemerintah Indonesia masih terus menggunakan propaganda negara dari masa Orde Baru, terutama sekitar Orde Baru narasi yang menyangkut pembunuhan. Hal ini dapat dilihat melalui kemarahan menuju perubahan dalam kurikulum tahun 2004, yang mengakibatkan pembalikan lengkap kembali ke kurikulum lama. Hal ini juga dapat dilihat melalui kegagalan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2004 dan pemberhentian oleh Jaksa Agung dari laporan Komnas HAM pada tahun 2012. Tindakan ini oleh pemerintah menunjukkan keengganan untuk merangkul rekonsiliasi, meskipun resmi retorika yang ingin perbaikan isu hak manusia.

3.3 Sentimen Anti-Komunis dalam Masyarakat.

Penyebutan komunisme dengan masyarakat Indonesia akan menarik berbagai tanggapan, meskipun bagi banyak orang itu adalah topik sensitif dan menyebabkan permusuhan langsung menuju komunisme. Pembunuhan massal adalah peristiwa tragis yang berdampak pada banyak keluarga, namun banyak permusuhan terhadap komunisme berasal dari ide yang lebih dalam. Gagasan bahwa komunisme merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat Indonesia;

⁴⁹Grace Leksana. "Silencing the Look of Silence." *Inside Indonesia*, January-March 2015.

karena idenya adalah ateis dan tidak kompatibel dengan Pancasila. Ketidakcocokan ini komunisme dengan Pancasila terutama kuat berasal dari kelompok pemerintah dan Islam.

Hal ini telah jelas oleh reaksi terhadap dua film mengenai pembantaian, *The Act of Killing* dan *The Look of Silence*. Film-film ini belum secara resmi dirilis di Indonesia meskipun menerima pujian kritis di luar negeri dan yang lebih penting menerima dukungan bercahaya dari berbagai akademisi dalam Indonesia. Satu-satunya pemutaran film Indonesia ini yang telah ada di daerah besar swasta, seperti kampus universitas. Pemutaran ini sering dirahasiakan, namun dalam banyak kasus garis keras Islam, militer, polisi dan kelompok anti-PKI telah mengganggu acara-acara ini.⁵⁰

Baru-baru ini ketika saya belajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, menunjukkan dari *The Look of Silence* terganggu oleh Forum Umat Islam. Penyelenggara screening menerima banyak pesan teks mengancam dan meskipun screening pertama ketika menjelang, pemutaran lanjut dibatalkan. Setelah argumen screening pertama diasuransikan antara preman dan siswa, namun universitas wakil dekan berhasil meredakan situasi dan tidak ada yang terluka. Insiden ini mengakibatkan banyak keluhan yang diajukan oleh mahasiswa dan dosen di UGM terhadap polisi Yogyakarta, yang mereka klaim tidak melakukan apa pun untuk mencegah hal ini "tragedi dibenarkan terhadap

⁵⁰Ari Susanto. "Hard-Line Islamic Group Storms UGM Student Screening of 'Senyap'." *The Jakarta Globe*, 18 December 2014

demokrasi." Ini mendemonstrasikan bahwa meskipun ada kebebasan yang lebih besar informasi yang sekarang tersedia di Indonesia, ini tidak selalu didukung oleh pemerintah.⁵¹

Jadi pemerintah Indonesia tidak hanya mempertahankan kurikulum Orde Baru, tetapi juga membuatnya agak sulit bagi masyarakat Indonesia untuk secara aktif terlibat dengan sumber bahan baru. Hal ini sangat relevan dengan sumber sejarah baru yang tersedia pasca Orde Baru. Intervensi pemerintah ini telah terjadi meskipun pembentukan apa yang telah menjadi sistem demokrasi yang sangat dihormati, yang sering dipuji dalam masyarakat internasional untuk toleransi dan pluralisme. Presiden Amerika Barack Obama baru-baru ini mengklaim, "Indonesia adalah contoh demokrasi, toleransi dan pluralisme," meskipun pertempuran yang sedang berlangsung untuk rekonsiliasi untuk pembunuhan massa pada tahun 1965.⁵²

Bagi banyak orang Indonesia, mereka tahu sedikit atau salah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lebih penting lagi, banyak tetap tidak menyadari bahwa pembunuhan massa sudah berkomitmen. Meskipun ada sejumlah besar informasi tentang pembunuhan tersedia untuk umum, banyak tetap menyadari keberadaannya. Hal ini mungkin karena beberapa alasan, yaitu mereka mungkin hanya tidak peduli dan tidak tahu untuk melihat di tempat pertama. Juga budaya sekitarnya pembunuhan itu masih tetap menjadi salah satu tabu, meskipun ada

⁵¹Ari Susanto. "Hard-Line Islamic Group Storms UGM Student Screening of 'Senyap'." *The Jakarta Globe*, 18 December 2014

⁵²"Obama Praises Indonesia for Democracy." *Tempo Magazine*, 10 November 2014

banyak informasi yang tersedia untuk umum dan fakta bahwa pembunuhan terjadi 50 tahun yang lalu. Walaupun saya telah menemukan orang Indonesia bersedia untuk berbicara tentang masalah ini, mereka telah berhasil diketahui bahwa itu bukan sesuatu yang mereka akan dibicarakan dengan teman-teman dan keluarga mereka.⁵³

Banyak orang Indonesia saya telah berbicara dengan mengakui bahwa mereka tidak tahu tentang pembantaian sampai setelah menyelesaikan sekolah dan juga di universitas topik ini masih kontroversial. Di sekolah mereka mengklaim hanya belajar tentang kudeta yang gagal dan tujuh perwira militer yang dibunuh, tetapi pembantaian yang diikuti tidak disebutkan.⁵⁴ Leksana sudah mengatakan bahwa bagaimanapun meskipun semua materi baru yang menjadi tersedia tentang pembunuhan sejak akhir Orde Baru, ada sedikit perubahan terhadap persepsi masyarakat Indonesia.⁵⁵

Selama Orde Baru pemerintah itu terus menekankan bahwa siapapun terhubung dengan PKI yang pelaku, korban tidak dan secara kolektif bertanggung jawab atas kematian tujuh perwira militer. Militer selalu mengklaim bahwa itu membela bangsa dari teror dari PKI dan ini juga menyebabkan banyak orang Indonesia untuk melihat mantan anggota PKI dengan skeptisisme dan tidak suka.⁵⁶ Rezim

⁵³Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, *Anonymous Informal Communication*, 24 March 2015

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Grace Leksana. "Silencing the Look of Silence." *Inside Indonesia*, January-March 2015.

⁵⁶James Balowski. "Yudhoyono government says 1965 murders 'saved' Indonesia." *Direct Action – For Socialism in the 21st Century*, 22 October 2012.

Orde Baru sudah memberlakukan versi sendiri dari sejarah dan dihilangkan semua orang lain, dan naratif ini masih kuat saat ini karena komunisme masih ilegal, dan masih tidak ada rekonsiliasi oleh pemerintah.⁵⁷

3.4 Sejarah Buku teks di Modern Indonesia.

Keadaan saat historiografi Indonesia sebagian besar masih merupakan warisan Orde Baru. Agus Suwignyo berpendapat bagaimana keadaan saat historiografi Indonesia didasarkan pada apa yang telah menjadi dikenal sebagai historiografi Indonesia-sentris.⁵⁸ Pendekatan ini sejarah adalah salah satu dimana Indonesia sendiri adalah subjek utama dan aktor dari peristiwa masa lalu. Jadi peristiwa sejarah yang ditafsirkan sebagai satu arah, dan jenis ini historiografi awalnya digunakan sebagai alat politik untuk kaum nasionalis untuk memperkuat kesatuan di antara masyarakat Indonesia selama tahun-tahun awal kemerdekaan. Pendekatan semacam ini mungkin berguna selama tahun-tahun awal kemerdekaan, namun bisa dibilang tidak lagi berguna hari ini. Masyarakat Indonesia telah menjadi lebih dan lebih demokratis di tahun-tahun pasca-Soeharto, sehingga mengekspos orang untuk rentang yang lebih besar dari ide-ide dan narasi sejarah alternatif.⁵⁹

⁵⁷Fanny. "Textbooks in School Still Condensed of PKI." *The Citizen Daily*, 1 October 2014.

⁵⁸Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

⁵⁹Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

Rezim Orde Baru dimanipulasi jenis ini Indonesia-sentris historiografi untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun pendekatan seperti tidak relevan lagi. Ada lebih banyak permintaan sekarang terhadap apa yang telah disebut "post-Indonesia pandangan dunia" dan masyarakat Indonesia telah mulai merangkul analisis kritis ketika datang ke peristiwa sejarah, namun mengejutkan ini belum tercermin dalam buku pelajaran sejarah.⁶⁰ Meskipun hubungan antara negara dan penduduk telah menjadi agak lebih dekat di tahun-tahun pasca-Soeharto, pendekatan "top-down" tradisional sejarah masih terus ciri buku teks. Jenis ini historiografi adalah hampir seluruhnya bertujuan untuk membenarkan tindakan oleh negara, dalam hal ini khususnya terhadap pembunuhan tragis yang terjadi di 1965-1966.

Jenis ini historiografi bertujuan untuk merampingkan elemen yang kompleks dari pembunuhan itu di 1965-1966. Meskipun rezim Orde Baru tidak lagi berkuasa, jelas bahwa unsur-unsur yang kuat dari rezim sebelumnya tetap di tempat dan warisan mereka terus dilindungi oleh mereka di pemerintahan. Hal ini sangat dipertanyakan apakah demokratisasi Indonesia dan runtuhnya rezim Orde Baru telah memiliki dampak yang signifikan dari penulisan buku teks sejarah nasional di Indonesia. Hal ini walaupun ada yang kekayaan yang lebih besar dari pengetahuan yang dibuat tersedia untuk masyarakat Indonesia dan pencabutan pembatasan sensor. Ada dua contoh dari buku teks sejarah nasional yang

⁶⁰Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

menunjukkan fenomena ini, Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS).⁶¹

SNI awalnya serangkaian enam volume yang diterbitkan pada masa Orde Baru, namun itu diterbitkan lagi pada tahun 2008. Ini adalah satu-satunya buku sejarah sekolah yang tersedia selama Orde Baru dan versi update menawarkan sedikit dari segi perspektif alternatif terhadap pembunuhan. Peristiwa 1965 yang benar-benar pindah ke bab tentang Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru dimulai dengan penerbitan dari Supersemar. Hal ini menciptakan kesan palsu bahwa Soeharto memiliki sedikit untuk melakukan dengan tragedi 1965 dan hanya mengambil alih kekuasaan setelah penerbitan dari Supersemar. Di sub-bagian dari bab ini yang didedikasikan untuk konflik, kekerasan dan hak manusia selama Orde Baru, tetapi 1965 pembantaian tidak dibahas sama sekali. Meskipun operasi militer yang tentang Gerakan 30 September dieksplorasi, pembunuhan massa itu yang diikuti masih benar-benar diabaikan.⁶²

Hal ini bisa mendemonstrasi gagasan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang dan dalam hal ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur rezim Orde Baru masih tetap di tempat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa ada sedikit penekanan pada analisis kritis dalam kurikulum dan kebenaran tidak nyaman untuk pemerintah akan terhapus. Mahasiswa mengatakan mereka hanya diajarkan tentang tujuh

⁶¹Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

⁶²*Ibid.*

perwira militer yang dibunuh, tapi tidak ada disebutkan tentang pembantaian. Meskipun mereka dapat memilih untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari sumber-sumber lain, banyak yang tidak akan tahu untuk mencari apakah mereka berada di bawah kesan bahwa tidak ada pembunuhan massal telah terjadi. Unsur-unsur ini juga jelas dalam IDAS yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini termasuk sumber daya manusia yang serius dan investasi keuangan oleh pemerintah.⁶³

Buku ini dapat dilihat sebagai buku teks otoritatif untuk sejarah nasional Indonesia, karena jumlah kantor kontributor terkemuka, yang termasuk banyak sejarawan dan akademisi. Prefaces sudah bahkan ditulis oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa mantan menterinya. Namun meskipun semua ini, peristiwa 1965-1966 masih dirawat sebagian besar sama dan lagi tampaknya melindungi warisan rezim Orde Baru.⁶⁴

Gerakan 30 September dipandang sebagai serangan terhadap ideologi negara dari Pancasila dan bangsa Indonesia, dan PKI digambarkan sebagai yang bertanggung jawab atas ancaman ini. Ada informasi lebih lanjut tersedia dari buku-buku pelajaran lainnya, seperti dokumen lebih, namun masih tidak ada analisis lebih dalam terhadap narasi alternatif. Dalam IDAS ada juga tidak menyebutkan pembunuhan massal yang terjadi dan, bab-bab tentang hak asasi manusia hanya

⁶³Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

⁶⁴*Ibid.*

akan mengeksplorasi teori, masalah hukum dan organisasi hak asasi manusia tanpa menjelajahi contoh Indonesia.⁶⁵ Jadi tidak ada eksplorasi dari ide hak manusia atau rekonsiliasi dari perspektif pemerintah.

Buku-buku ini kedua menunjukkan bahwa historiografi ini terus mendefinisikan buku-buku teks, meskipun jatuhnya Orde Baru. Masa reformasi itu telah memungkinkan kebebasan dalam Indonesia lebih besar dari ekspresi dan eksplorasi ilmiah dan pemikiran, namun hal ini belum tentu tercermin dalam cara sejarah nasional yang diajarkan. Peristiwa 1965-1966 terus diajarkan dalam masyarakat Indonesia melalui dimensi tunggal yang tidak memiliki analisis kritis dan pengakuan penting bahwa pembunuhan massal benar-benar terjadi. Ketidaksepakatan publik atas memori tidak baru dan mahasiswa harus siap untuk merangkul perbedaan pendapat, daripada dipaksa untuk mematuhi narasi tertentu yang tidak cukup menjelaskan acara tersebut.

Historiografi itu seharusnya membebaskan orang Indonesia, karena ketika perdebatan memperbolehkan menjadi mungkin, interpretasi lain dari pembunuhan bisa dieksplorasi. Mereka tidak akan ada lagi kebutuhan untuk mendukung satu narasi sejarah, yang meminggirkan PKI dalam masyarakat Indonesia. Jadi melalui perdebatan dan eksplorasi perspektif alternatif, masyarakat Indonesia akan mendapatkan pemahaman yang lebih besar dan kerendahan hati terhadap sesama warga negara mereka.

⁶⁵Agus Suwignyo. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

Pendekatan ini sejarah juga akan mencegah mengejar kebenaran demi melegitimasi mitos nasional, yang secara efektif apa yang rezim Orde Baru dicapai. Rezim Orde Baru itu didirikan pada ketakutan, salah komunisme yang difasilitasi melalui menyalahkan dari PKI untuk acara tanggal 30 September 1965, ketika dalam kenyataannya itu adalah sangat dipertanyakan peran PKI, jika ada sama sekali. Sejarah tidak boleh digunakan untuk indoktrinasi seperti itu selama rezim Orde Baru; melainkan harus pertempuran perspektif bersaing. Terlalu sering ada terlalu banyak penekanan diletakkan pada perspektif tertentu, daripada berfokus pada perdebatan itu sendiri.

Argumen dari sejarah tidak selalu memerlukan resolusi, dan akan selalu ada perbedaan pendapat di antara para sejarawan, tetapi yang penting adalah bahwa perspektif yang saling bertentangan diakui. Sudah terlalu lama sekarang sejarah telah digunakan sebagai alat politik di Indonesia dan meskipun kasus tidak unik, implikasi bisa pengukir. Melalui debat sehat pendapat masyarakat Indonesia dapat memperoleh pemahaman yang lebih besar dan toleransi satu sama lain. Hal ini disebabkan gagasan bahwa kurangnya resolusi berarti bahwa tidak ada kelompok terlihat lebih buruk atau lebih baik daripada yang lain. Cara orang ini bisa melihat peristiwa secara lebih objektif dan tidak memungkinkan sentimen dari pemerintah untuk mempengaruhi respon mereka terhadap isu-isu sejarah.

Jika Indonesia ingin menjadi demokrasi yang hidup, perlu untuk berdamai dengan apa yang terjadi, yang juga berarti perubahan dalam undang yang anti-komunis.

Dunia telah berubah dan Indonesia telah berubah, dan komunisme tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Perlu ada tindakan yang lebih di tingkat resmi dan jika mungkin, komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Namun, jika ini gagal, masyarakat sipil dan LSM harus terus didorong dalam masyarakat Indonesia dengan mendorong perspektif baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965. Namun, pendidikan tetap bisa dibidang daerah yang paling penting untuk perubahan karena orang-orang muda adalah pemimpin masa depan dan mereka layak untuk diinformasikan secara memadai. Sebaliknya mungkin sistem demokrasi bisa menjadi stagnan dan, yang lebih penting, sehingga orang tidak lupa tentang apa yang terjadi. Pendidikan hak asasi manusia tidak hanya tentang kesadaran apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting bahwa kekejaman seperti tidak boleh terjadi lagi.

4 Kesimpulan

4.1 Masih ada Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi untuk Isu Pembunuhan pada 1965-66.

Demokratisasi dalam 17 tahun terakhir telah menciptakan sebuah lingkungan di mana ada lebih banyak kebebasan informasi dan ekspresi, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran akademik dan penelitian. Namun meskipun perubahan ini dalam suasana politik, telah ada perubahan mendasar sedikit ke arah jalan sejarah nasional. Historiografi diajarkan oleh sekolah-sekolah masih nasionalis dan ini telah menyebabkan pemahaman sejarah yang tetap dan statis. Sistem pendidikan ini telah meninggalkan sedikit ruang untuk pluralisme berkaitan dengan peristiwa sejarah. Hal ini penting karena dalam dunia modern, Indonesia harus mengandalkan dan bekerja bersama negara lain. Hal ini dapat dilihat oleh Presiden Joko Widodo keputusan untuk melanjutkan eksekusi dan dampak ini memiliki hubungan Indonesia dengan negara masing-masing yang terlibat. Indonesia perlu menyadari bagaimana sendiri kebijakan nasional berinteraksi dengan orang-orang dari masyarakat internasional dengan yang saham hubungan diplomatik. Kegagalan untuk mengubah pendekatannya terhadap pendidikan hak asasi manusia tidak hanya akan berdampak itu hubungan dengan negara-negara asing, tetapi yang lebih penting, berdampak pada kemampuan Indonesia untuk menangani sejarah panjang konflik internal.

Kurikulum sejarah nasional terus ditandai dengan narasi diprediksi dan agenda-driven. Tampaknya untuk mewakili kepentingan kelompok kuat, seperti kelompok militer dan Islam, daripada pendekatan holistik menggabungkan semua elemen masyarakat Indonesia. Ini bertentangan dengan ide-ide pluralisme dan toleransi bahwa pemerintah Indonesia telah menganjurkan sejak akhir Orde Baru. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada sisa-sisa yang kuat Orde Baru dalam pemerintah, yang telah menghambat perkembangan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam isu Papua, pemberhentian laporan dari KOMNAS HAM dan yang paling penting dalam sistem pendidikan, yang akan memiliki dampak yang paling mendalam pada pemimpin masa depan Indonesia. Perubahan dalam sistem pendidikan bisa dibilang akan memiliki dampak yang mendalam pada isu-isu hak asasi manusia dan konflik di Indonesia, namun hal ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam.

Pendekatan analitis untuk pembunuhan massa akan mencegah mengejar kebenaran demi melegitimasi mitos nasional, yang secara efektif apa yang rezim Orde Baru dicapai. Rezim Orde Baru sudah didirikan ketakutan menuju komunisme, yang difasilitasi melalui menyalahkan untuk acara tanggal 30 September 1965, ketika dalam kenyataannya itu adalah sangat dipertanyakan apa peran yang dimainkan PKI hari itu, jika ada sama sekali. Sejarah tidak boleh digunakan untuk indoktrinasi seperti itu selama rezim Orde Baru; melainkan harus mendorong perspektif berbeda. Terlalu sering ada terlalu banyak penekanan diletakkan pada perspektif tertentu, daripada berfokus pada perdebatan itu sendiri.

Masyarakat sipil, seperti Syarikat, terus membuat kemajuan di daerah ini tetapi mereka tidak memiliki dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu dilibatkan dalam proses rekonsiliasi untuk memberikan legitimasi.

4.2 Saran

Menanggapi masalah yang terjadi itu dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Indonesia adalah bahwa hampir semua tekanan ada datang dari kelompok-kelompok sipil, seperti kelompok non-pemerintah dan "Think Tanks". Meskipun pemerintah Indonesia telah menganjurkan untuk masalah hak asasi manusia sejak akhir Orde Baru, ini telah muncul lebih karena alasan politik dan bukan masalah hak asasi manusia asli. Misalnya, ketika Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat hanya sebagai akibat dari tekanan internasional untuk melakukan sesuatu tentang catatan hak asasi manusia di Indonesia. Namun komisi telah sebagian besar tidak efektif dan diabaikan, meskipun mengirimkan berbagai laporan bahwa sejarah hak asasi manusia rinci di Indonesia.

Laporan-laporan ini sering termasuk rekomendasi, seperti kelompok kebenaran dan rekonsiliasi, namun ini telah banyak diberhentikan. Contoh terbaru adalah 2012 laporan, yang dieksplorasi pembunuhan, dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Meskipun saya mendorong kelompok-kelompok sipil untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan merekam temuan mereka, perlu ada tindakan yang lebih

kuat atas nama pemerintah jika Indonesia adalah untuk membuat kemajuan nyata. Indonesia masih merupakan negara demokrasi muda dan ini tidak akan berubah dalam semalam, namun berbagai langkah seharusnya diimplementasikan.

Pertama, kurikulum harus mengubah G30S / PKI ke G30S di buku pelajaran sekolah, sehingga memungkinkan pembunuhan menjadi lebih terbuka untuk interpretasi. Hal ini dicapai pada tahun 2004 meskipun hanya untuk jangka waktu singkat, sehingga menunjukkan bahwa perubahan tersebut dapat diimplementasikan. Kedua, pemerintah harus memungkinkan film-film seperti *The Act of Killing* dan *The Look of Silence*, yang akan resmi dirilis dan bahkan mensponsori pemutaran publik dari film. Ketiga, pemerintah harus melegalkan komunisme, tidak hanya untuk memberikan legitimasi untuk rekonsiliasi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa itu adalah serius tentang proses demokrasi.

Indonesia sering ditunjukkan sebagai negara yang pluralisme dan toleransi, namun pada saat yang sama sistem kepercayaan tertentu tidak diperbolehkan, seperti Yudaisme, komunisme dan berbagai sistem kepercayaan minoritas lainnya. Saya telah berfokus pada anti-komunisme karena saya percaya itu adalah salah satu link terkuat yang Indonesia masih memiliki dengan Orde Baru, namun hal ini tidak mengesalkan pentingnya sistem kepercayaan lainnya yang masih ilegal. Titik kunci di sini adalah bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berkembang yang perlu memimpin dengan contoh, mereka tidak bisa menjadi pluralistik dan toleran jika sistem kepercayaan tertentu adalah ilegal dan didiskriminasi.

4.3 Masalah dalam Penelitian

Topik penelitian saya sudah dibenarkan sendiri lebih ke arah wawancara informal, dan meskipun beberapa orang memungkinkan saya untuk menggunakan nama mereka, sebagian besar orang ingin tetap anonim. Itu jelas dalam banyak kasus bahwa ini adalah masalah sensitif yang orang biasanya tidak dibicarakan, apalagi di antara mereka sendiri. Ada juga beberapa kasus di mana orang tidak ingin berbicara tentang aspek pembunuhan, yang berarti bahwa saya harus bergantung pada sumber bahan sekunder. Saya menemukan bahwa cara terbaik untuk mendekati wawancara informal adalah untuk mengobati percakapan hanya sebagai pembicaraan santai dan tidak mencoba untuk mendorong perdebatan.

Alasan untuk ini adalah bahwa saya lebih tertarik pada perspektif mereka dan tujuan dari wawancara tidak adalah perubahan sikap masyarakat, tetapi untuk mendapatkan merasakan sentimen seputar pembunuhan. Sifat kontroversial topik kadang-kadang menyebabkan respon terbatas, yang meskipun tidak terlalu informatif, mendemonstrasi sentimen yang lebih luas di sekitar masalah ini. Implikasi dari pembunuhan jelas tragis bagi banyak orang, dan bagi banyak orang mereka juga ingin melupakan kejadian tersebut dan bahkan tidak berbicara tentang hal itu. Meskipun saya dapat bersimpati dengan unsur tragis penelitian saya, saya juga percaya bahwa membahas masalah ini dapat membawa pemahaman yang lebih besar. Ini adalah setelah semua titik penelitian saya,

bahkan jika orang bisa mengubah sikap mereka, mereka setidaknya sekarang memiliki lebih memahami pembunuhan.

5 Daftar Pustaka

5.1 Artikel Akademik

Conroe, Andrew Marc. "Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia." *Anthropology and History - University of Michigan*. 2012

Ekern, Stener. "Addressing resistance to human rights in human rights education – The case of Indonesia." *Faculty of Law – University of Oslo*, 15 May 2013

Suwignyo, Agus. "Indonesian National History Textbooks after the New Order. What's New under the Sun?" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 170, Issue 1, pp. 113-131, 2014

Mietzner, Marcus and Aspinall, Edward. "Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 50, Issue 3, pp. 347-369. 2014

Fealy, Greg and McGregor, Katharine. "Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics and Remembrance." *Indonesia*, Issue 89, pp. 35-60. 2010

McGregor, Katharine. "The Indonesian Killings of 1965-66." *Online Encyclopedia of Mass Violence, SciencesPo*. 2009

Simpson, Brad. "The Act of Killing and the Dilemmas of History." *Film Quarterly*, Volume 67, Issue 2, pp. 10-13. 2013

Vickers, Adrian. "Where Are the Bodies: The Haunting of Indonesia." *The Public Historian*, Volume 32, Issue 1, pp. 45-58. 2010

Woodward, Mark. "Only Now Can We Speak: Remembering Politicide in Yogyakarta." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Volume 26, Issue 1, pp. 36-57. 2011

Wahyuningroem, Sri Lestari. "Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 32, Issue 3, pp. 115-142. 2013

5.2 Buku-Buku.

Brauchler, Birgit. *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace*. London: Routledge Publishing, 2009

Hapsari, Ratna. *Panduan Bahan Ajar Sejarah Berwawasan Hak Asasi Manusia untuk Guru Sejarah*. Jakarta: Ciliwung Merdeka, 2011.

Intan, Benyamin Fleming. *“Public Religion” and the Pancasila-based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. Bern: Peter Lang, 2006

Robinson, Geoffrey. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali (Asia East by South)*. Ithaca: Cornell University Press. Reprint Edition, 1998.

Wardaya, Baskara. *Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence*. Clayton: Monash University Publishing. 2013

5.3 Wawancara.

Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, *Anonymous Informal Communication*, 24 March 2015

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, *Anonymous Informal Communication*, 25 February 2015

Aziz, Muhammad Imam. *Personal Formal Communication*, 12 February 2015.

5.4 Artikel Koran.

Conway, Michael. “The Problem With History Classes – Single-perspective narratives do students a gross disservice.” *The Atlantic*, 16 March 2015

Hearman, Vanessa. “Spectre of anti-communist smears resurrected against Jokowi.” *The Conversation*, 4 July 2014

Hearman, Vanessa. “Violent anti-communism is alive and well in democratic Indonesia.” *Rappler*, 9 March 2015.

Forbes, Mark. “Indonesian academics fight burning of books on 1965 coup.” *The Sydney Morning Herald*, 9 August 2007.

Balowski, James. “Yudhoyono government says 1965 murders ‘saved’ Indonesia.” *Direct Action – For Socialism in the 21st Century*, 22 October 2012.

Fanny. “Textbooks in School Still Condensed of PKI.” *The Citizen Daily*, 1 October 2014.

Johnson Tan, Paige. “Teaching and Remembering.” *Inside Indonesia*, April-June 2008

Leksana, Grace. "Silencing the Look of Silence." *Inside Indonesia*, January-March 2015.

Hunt, Tristram. "If we have no history, we have no future." *The Guardian*, 28 August 2011.

Nugroho, Johannes. "Johannes Nugroho: After 17 Years of Reformasi, Where Do We Stand? Indonesia's venture into democracy has resulted in very little change in the country's political culture." *The Jakarta Globe*, 20 May 2015

Susanto, Ari. "Hard-Line Islamic Group Storms UGM Student Screening of 'Senyap'." *The Jakarta Globe*, 18 December 2014

"Obama Praises Indonesia for Democracy." *Tempo Magazine*, 10 November 2014

Kwok, Yenni. "Movie, Books Push Indonesia to Confront Its Bloody Past." *Time Magazine*, 7 February 2013

Setiawan, Ken. "Human Rights for kids." *Inside Indonesia*, April-June 2005

5.5 Media Elektronik

United Nations (2015). *The Universal Declaration of Human Rights [on line]*, tersedia di <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>